

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Sumber keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber keuangan daerah yang fundamental, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

PAD yang bersumber dari retribusi dimana salah satunya berasal dari retribusi parkir. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah, "retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan". Retribusi parkir termasuk dalam kriteria retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati secara langsung oleh orang pribadi atau

badan. Dengan demikian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan Undang – undang yang berlaku. Meskipun penerimaan retribusi yang bukan menjadi penerimaan utama, namun retribusi parkir juga memiliki peranan, yaitu sebagai salah satu pendapatan dalam penerimaan retribusi daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpengaruh adalah dari sektor jasa perpakiran, sumber – sumber pendapatan asli daerah seperti yang tertuang dalam undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan kebijakan tersebut semaksimal mungkin, yang maksudnya adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang – undang ini.

Dalam rangka pembangunan daerah, otonomi daerah dibutuhkan upaya dari pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka memperoleh pendapatan yang sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, selama ini retribusi belum dapat diterima penerimaannya secara optimal. Dengan melihat potensi perolehan retribusi parkir yang peningkatannya tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kendaraan setiap tahunna, pada hasil dari Tugas Akhir ini dapat dilihat bahwa adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh Pemerintah Daerah, harusnya membuat daerah agar lebih berbenah dalam mengelola potensi retribusi parkir yang ada, terutama pada Dinas Perhubungan yang mengelola retribusi parkir tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil topik:

“KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Seberapa besar kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Padang.
2. Bagaimana perkembangan penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Padang.
2. Mengetahui bagaimana perkembangan penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan.

1.4 Metode Pengumpulan Dan Analisis Data

Penelitian ini dilaksanakan selama 40 hari kerja yang berlokasi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Padang, Jl. Sutan Syahrir, Rawang, Padang Selatan, Kota Padang Sumatera Barat 25127, (0751)61520.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu dengan cara mengamati dan meneliti berbagai aspek yang ada hubungannya dengan hal retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

1. Studi Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dengan cara:

a. Observasi

Yaitu pengamatan secara langsung yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk mengamati kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh UPT Perparkiran serta pihak - pihak yang terlibat. Kegiatan yang dilakukan berupa aktivitas pendataan rutin, dan kegiatan yang dilakukan secara terjadwal dalam waktu penelitian berlangsung. Data-data yang diperoleh dari pengamatan langsung, selanjutnya dilengkapi dan dikonfirmasi kepada narasumber atau informan.

b. Wawancara

Melakukan wawancara dengan narasumber yang berguna untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan yang dilakukan, maupun permasalahan yang muncul dan berkaitan langsung dengan penelitian. Sebelum melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Agar pelaksanaan wawancara berjalan dengan lancar sesuai keinginan peneliti,

maka sebelumnya peneliti mengadakan pendekatan terhadap staf-staf Unit Pelaksana UPT Perparkiran.

c. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan menelaah pustaka serta mengumpulkan data dan mempelajarinya dari beberapa referensi. Referensi diperoleh dari buku, artikel, dan Tugas Akhir yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya serta berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

2. Metode Analisis Data

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang yaitu menggunakan analisis kuantitatif kualitatif dengan rumus sebagai berikut:

- a. Perhitungan kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya pendapatan retribusi parkir terhadap total pendapatan retribusi daerah

$$KRD = \frac{TPAD}{TBRD} \times 100\%$$

KRD= Kemampuan Rutin Daerah

TPAD= Total Pendapatan Asli Daerah

TBRD=Total Belanja Rutin Daerah

Yang kemudian disesuaikan dengan keadaan yang ada, maka:

$$K = \frac{rRRP}{rRetribusi Daerah} \times 100\%$$

K=kontribusi

rRRP= Jumlah Realisasi Retribusi Parkir

rRetribusi Daerah= Jumlah realisasi Retribusi Daerah

- b. Untuk mengetahui besarnya target RRP terhadap target Retribusi Daerah.

Digunakan rumus sebagai berikut :

$$K = \frac{tRP}{tRetribusi Daerah} \times 100\%$$

K = Kontribusi

tRP = Target Retribusi Parkir

tRetribusi Daerah = Target Retribusi Daerah

- c. Untuk mengetahui besarnya realisasi RP terhadap realisasi Pendapatan Asli

Daerah . digunakan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{rRetribusi Daerah}{rPAD} \times 100\%$$

K =Kontribusi

rRetribusi Daerah= Realisasi Retribusi Daerah

rPAD = Realisasi Pendapatan Asli Daerah

- d. Untuk mengetahui besarnya target lain-lain PAD yang sah terhadap PAD

digunakan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{tLain-lain PAD yang sah}{tPAD} \times 100\%$$

K = Kontribusi

tLain-lain PAD yang sah= Target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

Yang sah

tPAD = Target Pendapatan Asli Daerah

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang mana disetiap bab terdiri dari sub-sub yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: Landasan Teori

Bab ini menjelaskan secara teori mengenai definisi PAD, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, definisi Trans Padang di Dinas Perhubungan Kota Padang

BAB III: Gambaran Umum

Bab ini berisikan tentang gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Padang, Sejarah umum Dinas Perhubungan Kota Padang, serta gambaran operasi dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Padang.

BAB IV: Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penulis, memuat upaya peningkatan pelayanan Trans Padang pada Dinas Perhubungan Kota Padang terhadap pendapatan asli daerah melalui lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta alur dan proses mekanisme pemungutan retribusi parkir

BAB V: Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat untuk dapat dipertimbangkan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan meningkatkan pelayanan Trans Padang pada Dinas Perhubungan.

